

1.3.c

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM

1. Laporan Tindak Lanjut Hasil monev ZI



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai berikut :

1. Pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas hasil monitoring dan evaluasi yaitu :
telah terbentuk tim kerja Zona Integritas dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 075 /OT.00 /1/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan telah diperbaharui dengan Nomor surat W8-A9/ 403 /OT.00 /2/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang tim pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
2. Pencanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 3 Maret 2019 di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Forkompimda dan tokoh masyarakat.
3. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu
4. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
 - a. Hasil monitoring dan evaluasi yaitu :
Telah dilakukan sosialisasi kepada aparaturnya di Pengadilan Agama Blambangan Umpu
 - b. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yaitu :
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan disosialisasikan di website Pengadilan Agama Blambangan Umpu
5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja hasil monitoring evaluasi yaitu :
 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas.
Sebagaimana dalam surat dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 379 / OT.00/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Role Model Pengadilan Agama Blambangan Umpu, pimpinan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, gratifikasi, disiplin kerja, peningkatan mutu pelayanan disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf.

2. Penetapan agen perubahan
Telah ditetapkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 380 /OT.00./2/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang pembentukan tim agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Aparatur di FORKOMPIMDA telah terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Budaya kerja dan budaya pikir
5. Telah mengacu kepada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

6. Penataan tata laksana

Hasil monitoring dan evaluasi yaitu

- 1) Penetapan SOP dan standar pelayanan
Telah disusun dan diterapkan standar operasional prosedur manajemen, Kesekretariatan dan kepaniteraan serta proses bisnis dan standar pelayanan Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- 2) E-Office/ e-Government
Implamentasi teknologi informasi pada administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan antara lain :
 - a. Bidang kepaniteraan
System informasi penelusuran perkara online (SIPP)
 - b. Bidang kesekretariatan
Umum dan keuangan
 - Aplikasi administrasi bendahara dan keuangan
 - Aplikasi barang milik negara dan persediaan dll

Kepegawaian organisasi dan tata laksana

 - Aplikasi system informasi kepegawaian
 - Aplikasi pendukung sikep (ABS SIMPEG)

Perencanaan

 - Aplikasi Monev
 - Aplikasi RKAKL
 - Aplikasi PP 39
 - c. Bidang Pelayanan Perkara
 - Mobile SIPP

7. Penataan system Manajemen sumber daya manusia (SDM)

Hasil monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai
Kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah merujuk kepada peta Jabatan dan Analisis (Anjab) serta Analisis kebutuhan pegawai (ABK) Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- c. Pola mutasi internal
Adanya kebijakan pimpinan terhadap pola mutasi internal di Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- d. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
- e. Penetapan kerja individu
Penetapan kerja individu dilakukan pada awal tahun yaitu dengan menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP)
- f. Penegakan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai
- g. Adanya surat keputusan ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/066 /KP.02.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan regulasi kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu

8. Penguatan akuntabilitas kinerja

Hasil monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. Keterlibatan pimpinan
Pimpinan terlibat dalam penyusunan rencana (renja), dan penetapan kinerja serta telah melakukan pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Adanya laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan indikator kinerja utama (IKU)

9. Penguatan Pengawasan

Hasil monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. Pengendalian gratifikasi
Ditetapkan pakta integritas untuk pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPIP)
Adanya keputusan surat ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/487 /HM.00/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan satgas SPIP dan tentang hakim pengawas bidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/060 /PS.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021
- c. Pengaduan masyarakat
Telah disusunnya alur layanan pengaduan masyarakat pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu
- d. Whistle Blowing System
Adanya system informasi pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS)
- e. Penanganan Benturan Kepentingan

Adanya pedoman SK Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 461 /PS.02/3/2021 Tanggal 4 Maret 2021

10. Peningkatan Kualitas Pengawasan Publik

Hasil monitoring dan evaluasi yaitu :


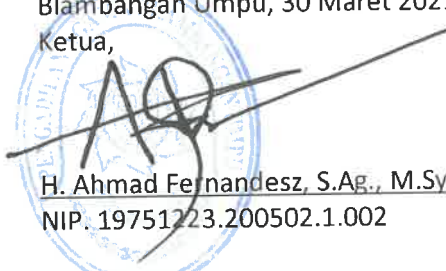
a. Standar pelayanan

Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu

b. Budaya Pelayanan Prima

c. Telah dilakukannya Sosialisasi budaya kerja di Pengadilan Agama Blambangan Umpu sistem reward dan Punishment sudah dilakukan melalui penilaian pegawai berkinerja baik.

Blambangan Umpu, 30 Maret 2021
Ketua,



H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy
NIP. 19751223.200502.1.002